

## EVALUASI KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI SUMBA TENGAH (Studi Kasus Pengembangan Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa)

Triseven Umbu Ngailu<sup>1</sup> , Boli Tonda Baso<sup>2</sup> , Yonathan h. L Lopo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana  
Kupang

E-mail: [ungeltriseven@gmail.com](mailto:ungeltriseven@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :20-03-2026

Revised :06-04-2026

Accepted :16-04-2026

**Keywords:** Evaluation,  
Policy, Food Estate,  
Development

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This research is entitled "Evaluation of Food Estate Policy in Central Sumba (Case Study of Food Estate Development in Umbu Pabal and Wairasa Villages). The purpose of this study is to analyze the implementation of the food estate policy in Umbu Pabal and Wairasa Villages, Central Sumba Regency. The theory used in this study is the policy implementation by Merilee S. Grindle. This study employed qualitative research methods, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, the implementation of this program has experienced complex and diverse dynamics in various aspects. Overall, this program has had a positive impact on both villages, but with varying degrees of success depending on the local context and implementation approach. From a policy content analysis perspective, the Food Estate program has undergone a significant transformation from a centralized approach to a more participatory model in terms of the interests affected.*

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul evaluasi kebijakan food estate di sumba tengah (studi kasus Pengembangan Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

implementasi kebijakan food estate di desa umbu pabal dan desa wairasa, kabupaten sumba tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi program ini mengalami dinamika yang kompleks dan beragam dalam berbagai aspek. Secara keseluruhan, program ini telah memberikan dampak positif bagi kedua desa, namun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda tergantung pada konteks lokal dan pendekatan implementasi yang diterapkan. Dari aspek analisis isi kebijakan, program Food Estate mengalami transformasi signifikan dari pendekatan sentralistik menuju model yang lebih partisipatif dalam hal kepentingan yang dipengaruhi.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini menjelaskan tentang evaluasi kebijakan program food estate di Sumba Tengah, khususnya di Desa Umu Pabal dan Desa Wairasa. Dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, pemahaman terhadap dinamika lokal, sumber daya alam, serta keterlibatan masyarakat menjadi krusial untuk menilai efektivitas program ini.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu Negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama, terlebih bagi Negara yang sedang berkembang, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan dan salah satu instrument utama pembangunan ekonomi (Rumawas, dkk. 2021:2).

Pengembangan food estate telah dilakukan Indonesia sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto, yang kemudian dilanjutkan hingga kini. Untuk program food estate yang direncanakan dikembangkan hingga tahun 2024, presiden Joko Widodo memantau secara langsung perkembangan dan kemajuan dari program food estate untuk memastikan terdapatnya produksi komoditi yang sesuai dan berpengaruh terhadap keamanan pangan (Ramadhan, 2024).

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan perternakan dalam satu kawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan pangan dan mendorong perekonomian lokal. Implementasi food estate telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terbitnya Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan ( PermenLHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate merupakan kebijakan pemerintah memberikan pedoman regulasi penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate yang merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang cukup medesak diantaranya dalam menjaga ketahanan nasional bidang pangan, sebagaimana juga tiap-tiap Negara memperkuat dirinya dalam menjaga ketersediaan pangan, sehingga tidak bergantung pada Negara lain. Pemerintah perlu mempersiapkan dalam hal terdapat kebutuhan berkenaan dengan program dan kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate. Pada konteks terdapat kebutuhan lahan dari kawasan hutan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan seperti Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) (Pasal 2).

Kebijakan Food Estate di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memasukkan Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional. Selain itu, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 24 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate. Undang-undang yang mendasari adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mendefinisikan pangan dan mengatur aspek legal terkait produksi dan distribusi pangan.

Program food estate di Indonesia telah diimplementasikan di beberapa daerah prioritas dengan tujuan utama memperkuat ketahanan pangan nasional dan memberdayakan masyarakat lokal. Di Kalimantan Tengah, misalnya, program ini difokuskan pada lahan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) dengan penanaman padi, jagung, singkong, serta pengembangan hortikultura dan peternakan sapi. Tantangan utama di wilayah ini adalah pengelolaan lahan gambut, pembangunan infrastruktur irigasi, dan potensi konflik lahan dengan masyarakat adat. Sementara itu, di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan, food estate dikembangkan untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung, serta hortikultura seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih. Tantangan di Humbang Hasundutan adalah topografi berbukit, keterbatasan akses air, serta perlunya adopsi teknologi oleh petani lokal. Selain itu, program food estate juga dijalankan di Papua, terutama Merauke, yang memiliki lahan luas dan dataran rendah, cocok untuk padi, jagung, dan kedelai, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam produktivitas, ketersediaan air, serta aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Di Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, program food estate juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian LHK, serta melibatkan BUMN dan petani lokal dalam pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat. Hasilnya, di beberapa

lokasi seperti Sumba Tengah program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai target produktivitas yang diharapkan.

Di kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, program Food Estate diimplementasikan di beberapa desa, termasuk Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa. Kedua desa ini memiliki karakteristik pertanian yang bertumpu pada sistem sawah tadah hujan, dimana ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan musiman. Kondisi geografis dan topografis di wilayah Sumba Tengah yang memiliki iklim kering dengan periode hujan relative singkat menjadikan pengembangan pertanian di wilayah ini sebagai tantangan tersendiri.

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah, luas lahan yang dialokasikan untuk program food estate di kedua desa ini mencapai total 5.000 hektar, dengan target peningkatan produksi pangan sebesar 30% dalam tiga tahun pertama implementasi. Namun, keberhasilan program ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat karakteristik geografis dan iklim yang unik di Sumba Tengah. Data BMKG menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tahunan di Sumba Tengah hanya sekitar 1.000-1.500 mm, jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah subur di Jawa yang mencapai 2.000-3.000 mm per tahun.

Desa umbu Pabal memiliki area sawah tadah hujan seluas sekitar 175 hektare sementara itu, Desa Wairasa memiliki lahan sawah tadah hujan yang lebih luas, mencapai sekitar 230 hektare. Total luas lahan yang menjadi fokus pengembangan Food Estate di kedua desa tersebut mencapai sekitar 3.000 hektare.

Karakteristik sawah tadah hujan di kedua desa ini menyebabkan produktivitas pertanian yang relative rendah dengan pola tanam yang terbatas. Petani umumnya hanya dapat melakukan satu kali masa tanam dalam setahun, yaitu pada musim hujan yang berlangsung sekitar 3-4 bulan. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kemiskinan di kedua desa, dimana Desa Umbu Pabal mencatat tingkat kemiskinan sebesar 45,3% dan Desa Wairasa sebesar 42,8%.

Namun demikian, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan. Data awal menunjukkan produktivitas yang masih di bawah target, dimana produksi padi di Desa Umbu Pabal hanya mencapai 3,8 ton/ha dan Desa Wairasa 4,1 ton/ha. Program ini didukung oleh struktur kelembagaan yang terdiri dari 12 kelompok tani, 2 unit koperasi pertanian, 1 unit lembaga penyuluh pertanian dengan 5 penyuluh, dan 2 unit BUMDes. Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 meliputi peningkatan produksi pangan sebesar 75%, penurunan angka kemiskinan 15%, peningkatan pendapatan petani 60%, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.200 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul "EVALUASI KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI SUMBA TENGAH (Studi Kasus Pengembangan Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian evaluasi keberhasilan food estate yaitu metode yang relevan dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut (Creswell dalam Ulber 2012:260) merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian suatu masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat evaluasi keberhasilan program food estate di dua desa yaitu Desa Uumbu Pabal dan Desa Wairasa.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti Adalah 1. Observasi Dalam penelitian ini, langkah awal yang penulis ambil adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi obek penelitian yaitu di Kabupaten Sumba Tengah tepatnya di Desa Uumbu Pabal dan Desa Wairasa kemudian mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Wawancara langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dan berkomunikasi secara langsung dengan para informan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 3. Dokumentasi Langkah terakhir yang penulis adalah dokumentasi untuk memperkuat validitas data primer yang penulis peroleh di lapangan. Dokumentasi bisa berupa catatan, literatur, foto ataupun dokumen yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan evaluasi keberhasilan program food estate.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Evaluasi Kebijakan Program Food Estate di Desa Uumbu Pabal dan Desa Wairasa.**

#### **Analisis Isi Kebijakan ( *Content of policy* )**

##### **a. Kepentingan yang dipengaruhi ( *interest Affected* )**

Implementasi Program Food Estate di Desa Uumbu Pabal dan Desa Wairasa melibatkan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi dan terkadang bertentangan. Program ini tidak hanya melibatkan kebijakan teknis pertanian, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kompleks di mana berbagai kepentingan saling berinteraksi, berkompetisi, dan bernegosiasi. Kepentingan-kepentingan tersebut meliputi kepentingan pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda ketahanan pangan nasional, kepentingan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wilayah, kepentingan masyarakat lokal sebagai subjek dan objek pembangunan, kepentingan investor dan pemangku kepentingan sektor pertanian, serta kepentingan kelompok konservasi dan

pemerhati lingkungan yang memperhatikan dampak ekologis dari pengembangan pertanian skala luas. Interaksi antar kepentingan ini menciptakan dinamika kompleks yang mempengaruhi jalannya implementasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Umbu Pabal, ( Bapak Soleman Umbu Sedu), bahwa:

*"Program Food Estate ini di mulai pada tahun 2021 pada awalnya kami kesulitan memahami bagaimana kami bisa mengambil peran aktif dalam program yang didominasi oleh arahan dari pusat. Sebagai pemerintah desa, kami ingin memastikan bahwa kepentingan masyarakat kami terakomodasi, tetapi terkadang kami merasa seperti hanya menjadi pelaksana kebijakan yang sudah diputuskan di atas."*

Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Wairasa (Bapak Yeheskiel Dangi Loja), bahwa:

*"Setelah dua tahun berjalan dari tahun 2020-2021, kami mulai merasakan bahwa program ini tidak lagi semata-mata program pusat yang kami laksanakan, tetapi sudah menjadi bagian dari agenda pembangunan desa kami. Petani-petani kami sekarang aktif memberikan masukan tentang bagaimana program ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah pusat dan provinsi juga mulai lebih mendengarkan aspirasi kami dibandingkan tahun pertama pelaksanaan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika kepentingan yang berbeda dalam implementasi program Food Estate. Perbedaan ini menggambarkan evolusi keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program pembangunan pertanian skala besar yang diinisiasi pemerintah pusat.

Selain itu juga adapun pernyataan dari Bapak Yonathan T. Dima (Selaku Petani Desa Umbu Pabal), bahwa:

*"Awal adanya isu akan adanya program food estate di desa ini, kami sangat senang dikarenakan bagaimana melihat desa-desa yang sudah berjalannya program ini dan ternyata benar program ini mengubah banyak cara bertani kami."*

Adapun pernyataan dari Bapak Umbu Kuta (Selaku Petani Desa Wairasa), bahwa: *"Pada awalnya memang banyak kebingungan dan kekhawatiran. Tetapi setelah hampir dua tahun, kami mulai melihat manfaatnya dan merasa bahwa suara kami mulai didengar. Kelompok tani kami sekarang rutin diundang dalam rapat koordinasi dengan dinas terkait. Meskipun tidak semua usulan kami diterima, setidaknya sekarang ada ruang untuk berdiskusi."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, program food estate tidak hanya mempengaruhi kepentingan petani melalui perubahan metode pertanian, tetapi juga berpotensi menciptakan mekanisme dimana petani dapat mempengaruhi jalannya program, dengan tingkat partisipasi yang berbeda-beda tergantung pada tahap implementasi dan pendekatan yang diterapkan di masing-masing desa.

Analisis berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Program Food Estate yang diimplementasikan di kedua desa tersebut menunjukkan bahwa dinamika kompleks dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian skala besar. Analisis keseluruhan mengungkapkan bahwa program ini mengalami transformasi signifikan dari pendekatan sentralistik menuju model yang lebih partisipatif. Pada fase awal

implementasi, program ini cenderung dijalankan dengan pendekatan top-down dimana pemerintah pusat memegang kendali utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa merasa berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah diputuskan dari atas tanpa ruang yang memadai untuk menyuarakan kepentingan lokal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara tujuan program dengan realitas dan kebutuhan di lapangan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi evolusi dalam tata kelola program yang ditandai dengan peningkatan keterlibatan pemerintah desa dan petani. Program Food Estate secara bertahap berintegrasi dengan agenda pembangunan desa dan menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Petani yang awalnya mengalami kebingungan dan kekhawatiran mulai melihat manfaat program dan mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam forum-forum koordinasi dengan instansi terkait.

Perbedaan tingkat adaptasi dan penerimaan program antar desa menunjukkan bahwa konteks lokal memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Desa-desa yang telah menjalankan program lebih lama cenderung menunjukkan tingkat keterlibatan dan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang baru mengadopsi program tersebut. Transformasi metode pertanian sebagai dampak program Food Estate tidak hanya mengubah aspek teknis produksi tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Perubahan ini menciptakan potensi pemberdayaan petani untuk lebih aktif memengaruhi jalannya program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan adaptif dalam implementasi program pembangunan pertanian skala besar yang memungkinkan penyesuaian terhadap konteks lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan jangka panjang Program Food Estate akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan tujuan nasional dengan aspirasi dan kepentingan stakeholder lokal.

#### **b. Jenis Manfaat yang dihasilkan ( *Types of Benefits* )**

Implementasi Program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa telah memberikan berbagai jenis manfaat yang dapat diidentifikasi sebagai dampak positif dari kebijakan ini. Manfaat-manfaat tersebut meliputi peningkatan produksi pertanian, stabilisasi harga komoditas, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, pembentukan kelembagaan petani yang terstruktur, dan peningkatan nilai tambah produk melalui pengolahan pasca panen. Analisis mendalam terhadap jenis-jenis manfaat ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil yang dicapai di kedua desa, mencerminkan variasi dalam pendekatan implementasi dan konteks lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Umbu Pabal ( Bapak Soleman Umbu Sedu), bahwa:

*“Bantuan alat pertanian berupa traktor dan mesin potong padi dari dinas pertanian sangat membantu efisiensi panen. Desa kami ditugaskan untuk mengawasi penggunaan dan perawatan*

*alat-alat tersebut termasuk distribusi BBM. Kami membentuk tim khusus yang mengatur jadwal penggunaan saat musim panen tiba sehingga semua lahan bisa terlayani dengan baik."*

Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu pemuda dari Desa Umbu Pabal (Kakak Boku Umbu Waci), bahwa:

*"Program ini membuka peluang bagi kami para pemuda untuk tidak harus merantau. Saya sekarang mengelola traktor dan alat pertanian modern di desa sendiri. Saat musim panen, kami bekerja bersama tim pengawas dari desa untuk memastikan proses panen berjalan lancar. Kami dibayar per lahan yang dikerjakan, dan ini menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan."*

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Wairasa (Bapak Yeheskiel Dangi Loja), bahwa:

*"Setelah dua tahun berjalan dari tahun 2020-2021, kami mulai merasakan bahwa program ini tidak lagi semata-mata program pusat yang kami laksanakan, tetapi sudah menjadi bagian dari agenda pembangunan desa kami. Petani-petani kami sekarang aktif memberikan masukan tentang bagaimana program ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah pusat dan provinsi juga mulai lebih mendengarkan aspirasi kami dibandingkan tahun pertama pelaksanaan."*

Adapun pernyataan dari Bapak Umbu Kuta (Selaku Petani Desa Wairasa), bahwa:

*" Dengan program ini, kami membentuk kelompok dengan adanya ketua kelompok, setiap satu kelompok ada 12 orang atau lebih untuk memudahkan kami dalam mendapatkan bantuan bibit dan pupuk secara merata. Hal tersebut membuat kami mengurangi anggaran untuk pembelian pupuk."*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat di analisis bahwa Program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa telah menghasilkan beberapa jenis manfaat sesuai dengan teori Grindle. Manfaat pertama berupa bantuan alat pertanian modern seperti traktor dan mesin potong padi yang meningkatkan efisiensi produksi dan menghemat waktu panen, dengan sistem pengawasan terorganisir melalui tim khusus di tingkat desa. Manfaat kedua adalah penciptaan lapangan kerja lokal bagi pemuda desa yang sebelumnya terpaksa merantau, memberikan sumber penghasilan alternatif melalui pengelolaan alat pertanian modern dengan sistem kompensasi berbasis kinerja per lahan. Manfaat ketiga berupa penguatan kelembagaan dan tata kelola desa, ditandai dengan transformasi program dari sekadar implementasi kebijakan pusat menjadi agenda pembangunan desa dengan peningkatan partisipasi dan masukan dari petani lokal, serta dialog yang lebih intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan desa. Manfaat keempat adalah strukturisasi organisasi petani melalui pembentukan kelompok-kelompok yang memfasilitasi distribusi bantuan bibit dan pupuk secara adil dan merata, sehingga mengurangi beban ekonomi petani dalam pembelian input pertanian dan memastikan akses yang lebih terstruktur terhadap sumber daya program.

### **c. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envisioned*)**

Program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Wairasa dirancang untuk mentransformasi pola pertanian tradisional menjadi lebih modern dan produktif, meliputi modernisasi sistem pertanian, peningkatan produktivitas lahan melalui irigasi

terintegrasi, pengembangan kapasitas petani lokal, pembukaan lahan baru untuk komoditas unggulan, serta penguatan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani.

Pernyataan ini di perkuat oleh Bapak Kepala Desa Umbu Pabal ( Bapak Soleman Umbu Sedu), bahwa:

*" Program Food Estate di desa kita sudah berjalan dengan baik. Sejak dimulai empat tahun lalu, kami melihat perubahan nyata dari cara bertani masyarakat. Dulu petani hanya bisa panen sekali setahun, sekarang bisa 2-3 kali berkat sistem irigasi baru. Hasil panen juga meningkat dari 3 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Tahun ini kami sudah buka 110 hektar lahan baru untuk tanaman padi. Pendapatan petani juga naik sekitar 40% dibanding sebelum ada program ini."*

Adapun pernyataan dari Bapak Frans Umbu Data, selaku buruh tani di Desa Umbu Pabal, bahwa :

*"Sebelum adanya program food estate ini seperti kami yang tidak memiliki lahan dan hanya tamat SMP tentu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Namun dengan adanya program ini yang sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu membuat kami ikut untuk terlibat dalam pekerjaan ini dan mendapatkan bayaran yang layak yang dapat membantu perekonomian keluarga"*.

Dan pernyataan dari Bapak Oksen Ibi Lona, selaku petani dari Desa Wairasa, bahwa:

*"Program ini membawa banyak perubahan baik bagi desa kami. Dulu infrastruktur pertanian kami sangat minim. Sekarang sudah ada jalur irigasi sepanjang 5 km yang mencakup hampir 70% lahan pertanian di desa. Tahun pertama program ini hanya mencakup 30% lahan, tahun kedua naik jadi 50%, dan sekarang sudah 70%. Kami juga punya gudang penyimpanan hasil panen yang tahun lalu belum ada. Dan juga menggunakan alat teknologi yang mempermudah pekerjaan kami seperti traktor dan mesin potong padi. Kalau dulu menggunakan kerbau untuk bajak sawah."*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan, dapat di analisis bahwa program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Wairasa telah membawa transformasi signifikan dalam sistem pertanian lokal. Program yang telah berjalan selama kurang lebih empat tahun ini menunjukkan kemajuan bertahap namun konsisten dalam berbagai aspek pertanian. Dari segi produktivitas, terdapat peningkatan yang nyata dengan frekuensi panen yang berubah dari sekali menjadi 2-3 kali setahun, serta hasil panen yang meningkat dari 3 ton menjadi 5 ton per hektar. Infrastruktur pertanian juga mengalami perbaikan substansial dengan dibangunnya sistem irigasi sepanjang 5 km yang kini menjangkau sekitar 70% lahan pertanian di desa Wairasa, meningkat secara bertahap dari 30% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua. Pembukaan lahan baru juga menjadi prioritas dengan tambahan 110 hektar lahan untuk tanaman padi di Desa Umbu Pabal.

Program ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pertanian, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Pendapatan petani dilaporkan meningkat sekitar 40% dibandingkan sebelum adanya program, sementara masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan seperti buruh tani dengan pendidikan terbatas kini memiliki kesempatan kerja dengan bayaran yang layak.

Modernisasi pertanian juga terlihat dari penggunaan teknologi seperti traktor dan mesin potong padi yang menggantikan cara tradisional seperti penggunaan kerbau untuk membajak sawah, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan hasil panen. Secara keseluruhan, program Food Estate ini telah menghasilkan perubahan signifikan dalam transformasi pertanian tradisional menjadi sistem yang lebih modern dan produktif, meningkatkan ketahanan pangan lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kedua desa tersebut, meskipun implementasinya berjalan secara bertahap selama beberapa tahun.



**Gambar 1. Penggunaan mesin potong padi di Desa Wairasa,2025.**



**Gambar 2. Mesin Traktor di Gudang penyimpanan**

#### **d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Konsep letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) dalam model Grindle mengacu pada lokasi atau tingkatan di mana keputusan-keputusan penting terkait implementasi kebijakan dibuat. Dalam evaluasi kebijakan program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa, letak pengambilan keputusan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program di lapangan.

Program Food Estate di kedua desa tersebut menunjukkan adanya distribusi pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat yang menginisiasi program hingga pemerintah desa dan petani lokal yang terlibat dalam implementasi teknis. Di Desa Umbu Pabal dan Wairasa, implementasi program Food Estate menunjukkan adanya ruang partisipasi bagi petani dan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan operasional, meskipun kerangka besar program ditentukan dari pusat.

Adapun pernyataan dari Bapak Kepala Desa Umbu Pabal (Bapak Soleman Umbu Sedu), bahwa:

*"Hampir seluruh keputusan terkait implementasi program datang dari pusat atau provinsi. Peran kami sebagai pemerintah desa dan kelompok tani lebih banyak sebagai pelaksana. Ketika ada permasalahan spesifik di lapangan, prosedur untuk mendapatkan keputusan adaptasi program sangat panjang dan sering kali terlambat."*

Dan juga pernyataan dari Bapak Kepala Desa Wairasa (Bapak Yeheskiel Dangi Loja), bahwa:

*"Dalam program Food Estate ini, kami tidak hanya menerima instruksi dari pusat. Kami memiliki forum koordinasi desa yang melibatkan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan perangkat desa yang bertemu setiap bulan. Forum ini menjadi tempat kami memutuskan banyak hal teknis seperti jadwal tanam, distribusi bibit dan pupuk, serta prioritas pembangunan infrastruktur pertanian."*

Dari hasil wawancara terlihat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan di kedua desa. Di Desa Umbu Pabal, pengambilan keputusan masih sangat terpusat di pemerintah pusat atau provinsi. Pemerintah desa dan petani lebih banyak bertindak sebagai pelaksana kebijakan tanpa banyak kewenangan untuk membuat keputusan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengatasi masalah-masalah khusus yang muncul di lapangan karena harus menunggu keputusan dari atas yang prosesnya panjang dan sering terlambat. Sementara itu, di Desa Wairasa terdapat pembagian pengambilan keputusan yang lebih merata. Meskipun arahan utama program tetap berasal dari pusat, desa ini memiliki forum koordinasi yang melibatkan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa. Forum ini menjadi tempat untuk membahas dan memutuskan hal-hal teknis seperti jadwal tanam, pembagian bibit dan pupuk, serta prioritas pembangunan infrastruktur pertanian.

Perbedaan cara pengambilan keputusan di kedua desa menunjukkan bahwa program nasional dapat diterapkan dengan cara berbeda tergantung pada hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Matius Umbu Katala (Selaku petani dari Desa Umbu Pabal), bahwa:

*“Dalam pelaksanaan program Food Estate di desa kami, keputusan tidak semata-mata datang dari atas. Kami memiliki forum koordinasi bulanan antara pemerintah desa, perwakilan petani, dan petugas pendamping dari dinas pertanian.”*

Adapun pernyataan dari Bapak Umbu Roka (Selaku petani dari Desa Wairasa), bahwa:

*“Sebagai petani, kami tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan program. Setiap awal musim tanam, kami mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa dan pendamping program untuk merencanakan kegiatan. Aspirasi kami didengarkan, seperti ketika kami mengusulkan jenis bibit padi yang cocok dengan kondisi tanah di sini.”*

Dan juga buruh tani Kakak Umbu Waci (Selaku Pemuda dari Desa Umbu Pabal), bahwa:

*“Sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan, saya memang tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan besar. Namun, ketika ada pembukaan lahan baru, kami para buruh diajak berdiskusi mengenai sistem pengupahan dan pembagian jadwal kerja. Ini membuat kami merasa dihargai dan bisa mendapatkan bayaran yang layak. Sebelumnya, keputusan semacam ini biasanya hanya ditentukan sepihak oleh pemilik lahan.”*

Hasil wawancara dengan berbagai pihak dapat di analisis bahwa adanya dinamika yang menarik terkait letak pengambilan keputusan dalam implementasi program Food Estate di kedua desa. Meskipun terdapat pernyataan dari Kepala Desa Umbu Pabal yang menggambarkan pengambilan keputusan yang masih tersentralisasi di tingkat pusat atau provinsi dengan pemerintah desa dan kelompok tani lebih berperan sebagai pelaksana, namun pernyataan dari petani di desa yang sama justru mengindikasikan adanya forum koordinasi bulanan yang melibatkan pemerintah desa, petani, dan petugas pendamping. Sementara itu, di Desa Wairasa terlihat adanya pola pengambilan keputusan yang lebih terdistribusi dan partisipatif, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Wairasa dan dikonfirmasi oleh pernyataan petani yang merasakan keterlibatan dalam proses perencanaan termasuk dalam penentuan jenis bibit yang sesuai dengan kondisi lokal. Bahkan untuk kelompok yang umumnya terpinggirkan dalam pengambilan keputusan seperti buruh tani, terlihat adanya ruang partisipasi meskipun terbatas pada hal-hal spesifik seperti pengupahan dan jadwal kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai program nasional Food Estate memiliki arahan strategis dari pusat, namun dalam implementasinya di lapangan terdapat variasi dalam derajat desentralisasi pengambilan keputusan, dengan kecenderungan ke arah pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal, yang kemungkinan berkontribusi pada efektivitas adaptasi program terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik di masing-masing desa.

#### **e. Pelaksana Program (*Program Implementers*)**

Kapasitas, komitmen, dan karakteristik para pelaksana program merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori

Grindle. Dalam konteks Program Food Estate di kedua desa, terdapat perbedaan signifikan dalam hal pelaksana program yang berkontribusi pada perbedaan hasil implementasi.

Dimana dalam pelaksanaan program ini di Desa Umbu Pabal yang berjalan di tahun 2021, sedangkan Desa Wairasa sudah berjalan di tahun 2020. Dimana program di kedua desa ini berhasil meningkatkan hasil pertanian, tetapi Desa Wairasa menunjukkan peningkatan yang lebih baik setiap tahunnya dibandingkan Desa Umbu Pabal. Hal ini karena Wairasa memulai program lebih awal.

Dan dalam pelaksanaan program ini, ada pernyataan dari Bapak Umbu Katala Raha (Selaku petani dari Desa Umbu Pabal), bahwa:

*"Program Food Estate yang mulai diterapkan di desa kami tahun 2021. Meski sudah membantu, infrastruktur ini belum menjangkau seluruh lahan pertanian di desa kami. Untuk mekanisasi pertanian, desa menerima bantuan 2 unit traktor tangan yang dikelola kelompok tani secara bergantian, namun jumlahnya masih kurang untuk lahan pertanian seluas 120 hektar."*

Adapun pernyataan dari Bapak Frans Umbu Data (Selaku petani dari Desa Umbu Pabal), bahwa:

*"Program bantuan bibit unggul dan pupuk bersubsidi juga sudah berjalan, tapi distribusinya kadang terlambat sehingga petani harus menyesuaikan jadwal tanam."*

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Umbu Roka (Selaku petani dari Desa Wairasa), bahwa:

*"Dalam pelaksanaan program ini dimana kami para petani yang mendapatkan dampak langsung di bentuk perkelompok dengan salah satu sebagai ketua. Ketika waktu panen tiba maka traktor dan mesin potong padi diturunkan oleh dinas dan BBM pun di tanggung oleh pemerintahan dinas."*

Dan juga pernyataan dari bapak Kadingi Pari (Selaku petani dari Desa Wairasa), bahwa:

*"dimana adanya pertemuan koordinasi rutin setiap bulan untuk membahas perkembangan program, kendala yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut. Semua pihak terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan."*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan terkait Program Food Estate, dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi program yang mempengaruhi hasil pertanian sesuai dengan teori Grindle tentang kapasitas, komitmen, dan karakteristik pelaksana program. Program Food Estate di Desa Wairasa yang dimulai lebih awal pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan hasil pertanian yang lebih baik dibandingkan Desa Umbu Pabal yang baru memulai program pada tahun 2021. Perbedaan waktu implementasi ini memberikan Desa Wairasa keunggulan dalam mengembangkan sistem koordinasi yang lebih matang. Dari segi infrastruktur dan sumber daya, Desa Umbu Pabal menghadapi keterbatasan dimana infrastruktur belum menjangkau seluruh lahan pertanian dan hanya memiliki 2 unit traktor tangan untuk area seluas 120 hektar, sementara Desa Wairasa memiliki sistem dukungan lebih terstruktur dengan penyediaan traktor dan mesin potong padi saat musim panen serta biaya BBM yang ditanggung pemerintah dinas. Sistem koordinasi di Desa Wairasa juga lebih efektif dengan adanya pertemuan rutin bulanan yang melibatkan semua pihak

dalam diskusi dan pengambilan keputusan, serta pembentukan kelompok tani dengan struktur kepemimpinan yang jelas, sedangkan di Desa Umbu Pabal masih menghadapi masalah distribusi bibit dan pupuk yang sering terlambat sehingga petani harus menyesuaikan jadwal tanam. Sesuai teori Grindle, perbedaan dalam kapasitas pelaksana (dukungan peralatan dan infrastruktur), komitmen pelaksana (koordinasi rutin dan dukungan berkelanjutan), dan karakteristik organisasi (struktur kelompok tani yang terorganisir) antara kedua desa tersebut berkontribusi pada perbedaan hasil implementasi program, dimana Desa Wairasa menunjukkan keberhasilan yang lebih optimal dibandingkan Desa Umbu Pabal yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi program.

### **Dampak Komprehensif Program Food Estate Sebelum dan Sesudah Implementasi**

Program Food Estate telah memberikan transformasi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa. Analisis dampak komprehensif menunjukkan perubahan mendasar dalam dimensi ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan yang memerlukan evaluasi mendalam untuk memahami efektivitas program secara keseluruhan.

#### **Dampak Ekonomi**

Berdasarkan data dan wawancara dengan para informan, kondisi ekonomi pertanian di kedua desa implementasi program Food Estate menunjukkan program Food Estate tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menciptakan diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Umbu Pabal (Bapak Soleman Umbu Sedu):

*"Pendapatan petani kita sekarang naik sekitar 40% dibanding sebelum ada program ini. Yang penting, sekarang pendapatan mereka lebih stabil karena bisa panen 2-3 kali setahun dan ada jaminan pasar untuk hasil panen."*

Program Food Estate juga telah memfasilitasi pengembangan rantai nilai pertanian yang lebih terintegrasi, mulai dari penyediaan input produksi, proses budidaya, panen, hingga pemasaran.

Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Frans Umbu Data (Petani Desa Umbu Pabal):

*"Sekarang kami tidak hanya fokus pada produksi. Ada pelatihan pengolahan hasil panen, pengemasan, dan pemasaran. Kami juga punya gudang penyimpanan yang memungkinkan kami menjual hasil panen di waktu yang tepat dengan harga yang lebih baik."*

Selain itu juga Program Food Estate telah memperkuat kohesi sosial melalui kerja sama dalam kelompok tani dan gotong royong dalam kegiatan pertanian.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadingi Pari (Petani Desa Wairasa):

*"Sekarang kami lebih kompak. Ada pertemuan koordinasi rutin setiap bulan untuk membahas perkembangan program, kendala yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut. Semua pihak terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan."*

Dari pernyataan tersebut dapat di analisis bahwa program Food Estate telah memberikan dampak yang komprehensif dan multidimensional bagi masyarakat petani di kedua desa implementasi. Dari aspek ekonomi, program ini berhasil menciptakan peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar 40% sekaligus memberikan stabilitas ekonomi melalui sistem panen 2-3 kali per tahun dan jaminan pasar yang mengurangi risiko ketidakpastian penjualan hasil panen. Transformasi yang lebih mendasar terlihat dari pengembangan rantai nilai pertanian yang terintegrasi, di mana petani tidak lagi hanya fokus pada produksi tetapi juga terlibat dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang memberikan nilai tambah lebih besar. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan memungkinkan petani menerapkan strategi pemasaran yang lebih optimal dengan menjual pada waktu dan harga yang tepat. Selain dampak ekonomi, program ini juga berhasil memperkuat modal sosial melalui penguatan kohesi kelompok tani dan sistem gotong royong, serta menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak. Kombinasi antara peningkatan ekonomi, penguatan sistem pertanian, dan kohesi sosial ini menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program dan menunjukkan bahwa pendekatan Food Estate yang komprehensif dapat menjadi model pembangunan pertanian yang efektif dengan memperhatikan aspek produksi, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi, meskipun untuk evaluasi yang lebih menyeluruh masih diperlukan data kuantitatif yang lebih detail dan perspektif dari berbagai stakeholder lainnya.

### **Analisis Konteks Implementasi Program Food Estate**

#### **Analisis Dampak Jangka Panjang dan Keberlanjutan**

##### **a. Evaluasi Kemandirian Petani dalam Mengelola Teknologi**

Adalah proses penilaian sistematis terhadap kemampuan dan kapasitas petani untuk secara mandiri mengadopsi, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi pertanian tanpa ketergantungan berkelanjutan terhadap bantuan eksternal. Evaluasi ini mencakup pengukuran sejauh mana petani telah mampu menguasai aspek teknis teknologi yang diperkenalkan, mulai dari pemahaman prinsip dasar kerja teknologi, keterampilan operasional dalam penggunaan sehari-hari, kemampuan melakukan perawatan dan perbaikan sederhana, hingga kapasitas untuk melakukan inovasi atau modifikasi teknologi sesuai dengan kondisi lokal.

Analisis keberlanjutan program Food Estate menunjukkan bahwa kemandirian petani dalam mengelola teknologi yang diberikan masih memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, teridentifikasi beberapa tantangan dalam aspek keberlanjutan teknologi:

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Matius Umbu Katala (Petani Desa Umbu Pabal):

*"Kami sudah bisa mengoperasikan traktor dan mesin potong padi, tapi untuk perawatan dan perbaikan masih bergantung pada teknisi dari luar desa. Kalau ada kerusakan, kami harus menunggu teknisi dari kabupaten yang kadang memakan waktu lama."*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi telah berjalan dengan baik, aspek pemeliharaan dan perbaikan masih memerlukan dukungan eksternal yang berkelanjutan.

Program Food Estate telah menunjukkan dampak positif dalam menarik minat generasi muda untuk tetap di desa dan terlibat dalam sektor pertanian. Sebagaimana disampaikan oleh Boku Umbu Waci (Pemuda Desa Umbu Pabal):

*"Dulu pertanian dianggap pekerjaan orang tua, sekarang kami para pemuda melihat peluang bisnis di sektor pertanian. Ada teman-teman saya yang tadinya mau ke kota, sekarang memilih stay di desa dan bergabung dengan kelompok tani."*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Food Estate telah mencapai kemajuan signifikan dalam transfer teknologi dan transformasi paradigma pertanian, namun masih menghadapi tantangan dalam pencapaian kemandirian penuh. Dari aspek adopsi teknologi, petani telah berhasil menguasai keterampilan operasional dasar dalam menggunakan peralatan modern seperti traktor dan mesin potong padi, yang menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas teknis petani. Namun, ketergantungan pada teknisi eksternal untuk pemeliharaan dan perbaikan mengindikasikan bahwa kemandirian teknologi belum tercapai sepenuhnya, sehingga keberlanjutan operasional teknologi masih rentan terhadap keterlambatan layanan teknis dari luar desa. Di sisi lain, program ini telah berhasil menciptakan transformasi persepsi yang fundamental terhadap sektor pertanian, khususnya di kalangan generasi muda yang kini memandang pertanian bukan lagi sebagai pekerjaan tradisional yang kurang menarik, melainkan sebagai peluang bisnis yang prospektif. Perubahan paradigma ini sangat strategis karena berpotensi mengatasi masalah regenerasi petani dan urbanisasi yang selama ini menjadi tantangan utama sektor pertanian. Kesimpulannya, meskipun program Food Estate telah berhasil meningkatkan adopsi teknologi dan mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian, masih diperlukan penguatan kapasitas lokal dalam pemeliharaan teknologi dan pengembangan sistem dukungan teknis yang lebih mandiri untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang program dan pencapaian kemandirian penuh dalam pengelolaan teknologi pertanian.

#### **b. Analisis Multiplier Effect Dan Dampak Sektoral Pengaruh Program Terhadap Sektor Ekonomi Lain**

Program Food Estate telah memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi lain di luar pertanian primer. Sebagaimana diobservasi di lapangan, peningkatan produktivitas pertanian telah mendorong berkembangnya dimana sektor Perdagangan munculnya pedagang pengumpul dan distributor hasil pertanian yang lebih aktif, sektor Jasa dengan berkembangnya jasa transportasi untuk angkut hasil panen dan jasa perbaikan alat pertanian sedangkan di sektor industri kecil yaitu munculnya usaha pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Umbu Roka (Petani Desa Wairasa):

*"Sekarang banyak pedagang yang datang langsung ke desa untuk membeli hasil panen kami. Ada juga yang mulai usaha pengolahan beras dan makanan ringan dari hasil pertanian kita. Ini membuka peluang kerja baru untuk masyarakat."*

Berdasarkan observasi lapangan dan pernyataan informan, program Food Estate telah berhasil menciptakan efek multiplier yang signifikan terhadap perekonomian lokal melalui diversifikasi sektor ekonomi di luar pertanian primer. Peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi petani, tetapi juga memicu tumbuhnya ekosistem ekonomi yang lebih kompleks dan saling terkait. Dalam sektor perdagangan, munculnya pedagang pengumpul dan distributor yang lebih aktif menunjukkan bahwa program telah berhasil menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan terintegrasi, dimana hasil pertanian yang melimpah menarik minat pedagang untuk datang langsung ke desa, sehingga mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan margin keuntungan petani. Perkembangan sektor jasa, khususnya jasa transportasi dan perbaikan alat pertanian, mengindikasikan bahwa modernisasi pertanian telah menciptakan kebutuhan akan layanan pendukung yang spesifik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat non-petani. Aspek yang paling menarik adalah munculnya sektor industri kecil pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga, yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku tetapi juga mulai mengembangkan kemampuan untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian melalui pengolahan sederhana. Fenomena ini mencerminkan transformasi ekonomi dari struktur ekonomi yang berbasis pada sektor primer menuju ekonomi yang lebih diversifikasi dengan keterlibatan sektor sekunder dan tersier, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja baru, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian semata, dan meningkatkan resiliensi ekonomi lokal. Keberhasilan program dalam memicu diversifikasi ekonomi ini juga menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pertanian dapat menjadi katalis untuk pembangunan ekonomi daerah yang lebih komprehensif, dengan dampak positif yang menjalar ke berbagai sektor ekonomi lainnya, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

#### **Aspek Konteks Implementasi (Context of Implementation)**

#### **Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat (Power, interest, and strategy of actors involved)**

Implementasi program Food Estate di kedua desa dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan strategi dari berbagai aktor yang terlibat. Dukungan kepala desa dan tokoh adat menjadi faktor penting dalam memobilisasi partisipasi masyarakat, dengan 95% responden di Desa Umbu Pabal dan 92% di Desa Wairasa menyatakan bahwa dukungan pemimpin lokal berkontribusi pada keberhasilan program. Strategi pelibatan stakeholder juga efektif melalui pembentukan forum multi-stakeholder yang melibatkan perwakilan pemerintah, petani, pelaku usaha, dan akademisi, serta penerapan pendekatan bottom-up dalam perencanaan kegiatan, dengan 70% kegiatan merupakan usulan dari masyarakat. Resolusi konflik kepentingan telah berjalan dengan baik, di

mana terdapat 3 kasus konflik kepentingan di Desa Umbu Pabal dan 4 kasus di Desa Wairasa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi, dengan dukungan dari tim khusus penanganan keluhan dan konflik yang beranggotakan perwakilan berbagai pihak. Karakteristik kelembagaan dan rezim pemerintahan setempat juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang stabil dengan masa jabatan kepala desa yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun, serta aparatur desa yang memadai (14 orang di Desa Umbu Pabal dan 16 orang di Desa Wairasa). Transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan melalui sistem pelaporan berkala yang terbuka untuk publik dan audit independen terhadap pelaksanaan program yang dilakukan setiap tahun dengan hasil yang memuaskan. Dukungan politik yang konsisten dari pemerintah daerah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, serta kebijakan daerah yang mendukung seperti Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

Tingkat kepatuhan implementor dan daya tanggap terhadap kebutuhan kelompok sasaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Sebanyak 92% kegiatan di Desa Umbu Pabal dan 90% kegiatan di Desa Wairasa dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, dengan penyimpangan pelaksanaan yang minimal dan segera dikoreksi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi reguler. Daya tanggap terhadap permasalahan juga sangat baik, ditunjukkan dengan waktu respon terhadap keluhan masyarakat rata-rata 3 hari di Desa Umbu Pabal dan 4 hari di Desa Wairasa, serta pembentukan unit layanan pengaduan dengan 2 petugas khusus di setiap desa. Adaptasi terhadap kondisi lokal juga dilakukan melalui modifikasi teknik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi agroekologi setempat dan penyesuaian jadwal tanam berdasarkan kearifan lokal tentang musim.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Food Estate**

Berdasarkan analisis terhadap aspek isi kebijakan dan konteks implementasi, beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan program Food Estate di kedua desa antara lain pendekatan partisipatif, dukungan politik dan kelembagaan yang kuat, sinergitas antar stakeholder, pendampingan teknis yang intensif, serta adaptabilitas program. Pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi faktor utama keberhasilan program, dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85% di Desa Umbu Pabal dan 82% di Desa Wairasa. Pendekatan partisipatif ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, yang tercermin dari tingginya tingkat swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan program, mencapai Rp450 juta di Desa Umbu Pabal dan Rp520 juta di Desa Wairasa. Komitmen politik dari pemerintah pusat hingga desa dalam bentuk regulasi, anggaran, dan fasilitasi teknis menjadi fondasi yang kuat bagi implementasi program, dengan konsistensi dukungan yang tampak dari adanya 3 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Bupati yang secara khusus mendukung program Food Estate. Koordinasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat membentuk ekosistem yang mendukung keberhasilan program yang

berkontribusi pada transfer teknologi, pelatihan, dan pemasaran hasil pertanian. Kehadiran tenaga pendamping yang kompeten dan berkesinambungan membantu petani dalam mengatasi berbagai kendala teknis, dengan ratio pendampingan ideal (1:35) yang memungkinkan pendampingan yang intensif dan berkualitas. Kemampuan program untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan tanggap terhadap perubahan situasi menjadi kunci keberlangsungan program, dengan terdapat 8 modifikasi teknis di Desa Umbu Pabal dan 10 modifikasi di Desa Wairasa yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi.

Meskipun berhasil, implementasi program Food Estate di kedua desa tidak luput dari berbagai tantangan. Pada awal implementasi, 35% petani di Desa Umbu Pabal dan 42% petani di Desa Wairasa menunjukkan keengganan untuk mengadopsi teknologi baru. Tantangan ini diatasi melalui demonstrasi plot (demplot) di lahan petani pelopor, kunjungan belajar ke daerah lain yang telah sukses, dan pendekatan bertahap dalam introduksi teknologi. Kondisi jalan akses pertanian dan jaringan irigasi yang belum memadai menjadi kendala pada tahap awal, yang ditangani melalui alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar, mobilisasi swadaya masyarakat untuk pemeliharaan infrastruktur, dan kerjasama dengan program pemerintah lainnya, seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Ketidakstabilan harga produk pertanian yang berpotensi mengurangi motivasi petani diatasi dengan pembentukan koperasi pemasaran di kedua desa, kontrak farming dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan fasilitas pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah. Perubahan pola cuaca dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) menjadi tantangan bagi produktivitas, yang ditangani melalui introduksi varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, pengembangan sistem peringatan dini serangan OPT, dan pelatihan pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kebijakan Program Food Estate di Desa Umbu Pabal dan Desa Wairasa menggunakan model analisis isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) Grindle, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini mengalami dinamika yang kompleks dan beragam dalam berbagai aspek. Secara keseluruhan, program ini telah memberikan dampak positif bagi kedua desa, namun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda tergantung pada konteks lokal dan pendekatan implementasi yang diterapkan.

Dari aspek analisis isi kebijakan, program Food Estate mengalami transformasi signifikan dari pendekatan sentralistik menuju model yang lebih partisipatif dalam hal kepentingan yang dipengaruhi. Program yang awalnya didominasi oleh arahan dari pusat secara bertahap telah berintegrasi dengan agenda pembangunan desa dan menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Jenis manfaat yang dihasilkan bersifat multidimensi meliputi bantuan alat pertanian modern, penciptaan lapangan kerja lokal, penguatan kelembagaan desa, dan strukturisasi organisasi petani. Derajat

perubahan yang dicapai sangat signifikan dengan transformasi sistem pertanian tradisional menjadi modern dan produktif, terlihat dari peningkatan frekuensi panen dari sekali menjadi 2-3 kali setahun, hasil panen meningkat dari 3 ton menjadi 5 ton per hektar, dan peningkatan pendapatan petani sekitar 40%. Letak pengambilan keputusan menunjukkan variasi dalam derajat desentralisasi antar desa, dengan kecenderungan ke arah pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Pelaksana program memiliki perbedaan signifikan dalam kapasitas, komitmen, dan karakteristik yang mempengaruhi hasil implementasi, dimana Desa Wairasa menunjukkan keberhasilan yang lebih optimal dibandingkan Desa Umbu Pabal.

Dari aspek konteks implementasi, dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat menunjukkan hasil yang positif dengan dukungan kepala desa dan tokoh adat mencapai 95% di Desa Umbu Pabal dan 92% di Desa Wairasa. Strategi pelibatan stakeholder efektif melalui forum multi-stakeholder dan pendekatan bottom-up dengan 70% kegiatan merupakan usulan masyarakat. Resolusi konflik kepentingan berjalan baik dengan penyelesaian semua kasus melalui mekanisme mediasi. Karakteristik kelembagaan dan rezim pemerintahan mendukung dengan struktur pemerintahan yang stabil, transparansi dan akuntabilitas yang baik, serta dukungan politik yang konsisten. Tingkat kepatuhan implementor mencapai 92% di Desa Umbu Pabal dan 90% di Desa Wairasa, dengan daya tanggap terhadap keluhan masyarakat yang sangat baik (rata-rata 3-4 hari).

Faktor-faktor keberhasilan program meliputi pendekatan partisipatif dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85% di Desa Umbu Pabal dan 82% di Desa Wairasa, dukungan politik dan kelembagaan yang kuat dengan 3 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Bupati pendukung, sinergitas antar stakeholder yang efektif, pendampingan teknis intensif dengan ratio ideal 1:35, dan adaptabilitas program dengan 8-10 modifikasi teknis sesuai kondisi lokasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi adopsi teknologi (35-42% petani), keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan harga, dan perubahan iklim, program berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui strategi demonstrasi plot, pembangunan infrastruktur bertahap, pembentukan koperasi pemasaran, dan introduksi varietas tahan iklim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. Pearson

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Weiss, C.H. (1972). "*Evaluation Research: Methods of Assessing Program Effectiveness* (p. 97). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

### Sumber Jurnal

Alifya, H., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2024). Strategi Food Estate Sebagai Solusi Keamanan Pangan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 116-124.

- Ananta, I. D. (2023). Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau pengembangan food estate sebagai strategi ketahanan nasional pada era pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 27-41.
- Dwiguna, A. R., & Munandar, A. I. (2020). Analisis Naratif Kebijakan Pangan Nasional Melalui Program Food Estate. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 273-284.
- Risdianto, A., & Jotham, F. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan food estate Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50-59.
- SARI, H. M. (2023). *Keberhasilan Kebijakan Food Estate pada Ketahanan Pangan di Sumba Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- SUPRIANTO, J. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Desa di Desa Pilang dan Desa Simpur)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

#### **Peraturan dan Undang-Undang**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020. Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

#### **Website**

- <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/87-food-estate-sumba-tengah-harapan-kecukupan-pangan-di-ntt#:~:text=Food%20estate%20Sumba%20Tengah%20bertujuan,pupuk%2C%20dan%20lain%2Dlain.> ( di akses pada tanggal 15 Juni 2024)
- <https://www.ksp.go.id/food-estate-di-sumba-tengah-petani-waktu-tanam-dan-panen-lebih-cepat.html>( di akses pada tanggal 17 juni 2024)
- <https://www.swadayaonline.com/artikel/8338/Bupati-Paulus--Program-Food-Estate-Adalah-Kebijakan-Mulia-dan-Berharga-Bagi-Masyarakat-Sumba-Tengah/>( di akses pada tanggal 25 Juli 2024)